

PENURUNAN INDEKS GINI PENDIDIKAN: INDONESIA, JAWA TENGAH DAN MAGELANG

Budiono

Bappeda dan Litbangda

Kabupaten Magelan

e-mail : berbudi480@ymail.com

ABSTRACT

This policy paper aims to determine the relationship between educational inequality and the average length of schooling in Indonesia, Central Java Province and Magelang District. The data source is the national socio-economic survey (Susenas / BPS) in 2015 and 2020, especially the table: the percentage of the population aged 15 years and over according to the type of area and the highest level of education completed. To determine education inequality, it is calculated using data on the average length of schooling of the population aged 15 years and over, the Lorenz curve and the Gini index of education. The average length of schooling in Indonesia, Central Java Province, Magelang Regency increased during the 2015–2020 period, while education inequality decreased. The Gini index calculation results show that Indonesia is more evenly distributed than Central Java, and Magelang is the least even. A negative relationship was found between mean years of schooling and the Gini index of education. a positive relationship was found between the rate of increase in mean years of schooling and a decrease in the Gini index of education.

ABSTRAK

Naskah kebijakan ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara ketimpangan pendidikan dengan rata-rata lama sekolah di Indonesia, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Magelang. Sumber data adalah survei sosial ekonomi nasional (Susenas / BPS) tahun 2015 dan 2020, khususnya tabel: persentase penduduk usia 15 tahun ke atas menurut tipe daerah dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Untuk menentukan ketimpangan pendidikan dihitung melalui, data rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, kurva Lorenz dan indeks Gini pendidikan. Rata-rata lama sekolah di Indonesia, Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Magelang meningkat selama periode 2015–2020 sedangkan ketimpangan pendidikan menurun. Hasil perhitungan indeks gini menunjukkan bahwa Indonesia lebih merata daripada Jawa Tengah, dan Magelang paling tidak merata. Hubungan negatif ditemukan antara rata-rata tahun sekolah dan indeks Gini pendidikan. hubungan positif ditemukan antara tingkat kenaikan rata-rata tahun sekolah dan penurunan indeks Gini pendidikan..

Kata Kunci : Angka pendidikan, Ketimpangan pendidikan, Distribusi pendidikan,
Rata-rata lama sekolah.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pelayanan urusan pendidikan merupakan amanat konstitusi. Sesuai Pembukaan UUD 1945, mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan ‘tujuan’ pembentukan pemerintahan negara, yang dijadikan ‘visi’ abadi pemerintahan negara. Selanjutnya, amanat terkait hak warga negara dan kewajiban pemenuhan pendidikan ditegaskan pada pasal 31 UUD 1945, ayat 1 hingga ayat 5.

Sebelumnya, pada pasal 28 UUD 1945, ditegaskan bahwa ‘pendidikan’ merupakan hak azasi manusia, sebagai berikut. “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Sejalan dengan komitmen nasional, Indonesia sebagai salah satu Negara Anggota UNESCO berkomitmen kuat untuk memastikan pencapaian enam tujuan Pendidikan untuk Semua (EFA). Tujuan pendidikan adalah: 1) memperluas pendidikan dan pengasuhan anak usia dini peluang, 2) menjamin akses yang meluas dan setara ke pendidikan dasar, 3) memperluas kesempatan belajar seumur hidup, 4) memastikan peningkatan melek huruf dan melanjutkan pendidikan, 5) menjamin kesetaraan gender dalam pendidikan, dan 6) meningkatkan dan menjamin kualitas dan standar pendidikan.

Dalam mencapai tujuan tersebut, Indonesia telah menempuh sejumlah langkah untuk menyelaraskan perencanaan dan implementasi EFA di dalamnya pembangunan jangka menengah dan panjang yang lebih luas, dan sepenuhnya mengintegrasikan EFA ke dalam Indonesia visi pembangunan nasional kesejahteraan yang luas.

Namun, setelah 77 tahun merdeka dan 20 tahun sejak komitmen MDGs, masih banyak anak bangsa yang belum dapat menikmati pendidikan. Data menunjukkan masih besarnya proporsi penduduk yang belum dapat menikmati pendidikan atau ‘tidak/belum pernah sekolah/belum tamat’, atau memiliki ijazah SD.

Di Indonesia masih ada 16,62 persen penduduk yang tidak memiliki ijazah, di Jawa Tengah 14, 41 persen, dan di Kab. Magelang masih 15,94. Sementara, Pada ujung yang lain, proporsi penduduk yang dapat menikmati pendidikan tinggi sangat sedikit. Di Indonesia hanya 9,26 persen penduduk yang tidak memiliki ijazah sarjana, di Jawa Tengah hanya 6,87 persen, dan di Kab. Magelang hanya 6,72.

Perbedaan kualitas dan durasi pendidikan yang diterima anak-anak secara mendasar dapat mempengaruhi mata pencaharian mereka di masa depan. Anak-anak yang gagal menguasai keterampilan dasar lebih cenderung berakhir dalam pekerjaan yang tidak aman dan bergaji rendah, dibandingkan dengan anak-anak yang meninggalkan sekolah yang dilengkapi dengan keterampilan yang dibutuhkan di pasar tenaga kerja saat ini (Samer Al Samrri, 2013).

Gillis, et. al (1992: 281-221) menemukan korelasi yang sangat kuat antar tingkat pendidikan yang dapat dicapai dengan pendapatan/penghasilan, baik secara individual maupun secara social. Juga ada hubungan yang sangat kuat antara pencapaian tingkat pendapatan dengan pendapatan nasional maupun regional. Potensi pendapatan ini dapat terkendala jika pendidikan dinikmati secara tidak merata. Pada umumnya masyarakat yang mampu melanjutkan pendidikan adalah kelompok masyarakat yang lebih mampu.

Borjas (1996: 222-224) menemukan bahwa walaupun masyarakat faham bahwa membiayai pendidikan anak merupakan investasi yang menguntungkan, tetapi mereka belum tentu mampu berinvestasi, karena untuk bersekolah disamping ada biaya langsung (buku, peralatan sekolah, asrama dan transportasi) tetapi mereka sering mereka tidak mampu menanggung beban biaya tidak langsung, berupa hilangnya peluang memperoleh pendapatan karena waktunya untuk sekolah atau opportunity cost.

Akibatnya, penduduk yang berpendidikan rendah hanya akan diterima bekerja pada sector-sektor yang memberikan upah rendah. Dengan demikian ketimpangan pendidikan menjadi sumber peningkatan ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu perlu didorong adanya kebijakan untuk pengarus-utamaan penurunan ketimpangan pendidikan.

Kajian kebijakan ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara ketimpangan pendidikan dengan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Magelang. Terkait dengan tujuan ini,

penghitungan rata-rata lama sekolah (AYS) dan indek gini pendidikan (IGI). Selain itu, penelitian juga bertujuan untuk mengetahui hubungan antara rata-rata lama sekolah dan indeks Gini pendidikan antara tahun 2009 dan 2019. Sedangkan, motivasi penulisan ini adalah untuk melakukan pemantauan pelaksanaan program pendidikan untuk semua, dan dari hasil kajian adalah untuk menyusun rekomendasi kebijakan.

Thomas et al (2001) menghitung indeks pendidikan menggunakan data yang terkait dengan tingkat pendidikan di 85 negara antara 1960 dan 1990. Menurut penelitian ini, antara 1960 dan 1990, ketimpangan pendidikan menurun di banyak negara. Salah satu temuan terpenting dari ini Studi ini menemukan bahwa terdapat hubungan negatif antara rata-rata lama sekolah dan koefisien gini pendidikan.

Digdowiseiso (2010) menunjukkan bahwa: Pertama, dari sisi nasional, terjadi penurunan Gini pendidikan, Kedua, belajar dari kajian antar daerah menggambarkan bahwa seiring berjalannya waktu, daerah pedesaan memiliki ketimpangan pendidikan yang lebih tinggi dari pada perkotaan. Ketiga, studi antar gender menunjukkan bahwa penduduk perempuan memiliki ketimpangan pendidikan yang lebih tinggi dari populasi pria, Keempat, studi keterkaitan antara gender dan bidang menyatakan bahwa tingkat ketimpangan pendidikan penduduk perempuan dan laki-laki di pedesaan lebih tinggi dari itu di daerah perkotaan. Terakhir, dalam kaitan antara dua variabel, terdapat korelasi negatif antara Koefisien Gini pendidikan dan rata-rata lama sekolah.

Selanjutnya, ada beberapa kebijakan yang bisa diambil pemerintah untuk membantu upaya tersebut mencapai kesetaraan pendidikan di Indonesia. Pertama, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten harus mengambil atas tanggung jawab untuk mengelola setiap potensi sumber daya yang dimiliki, terutama sumber daya manusia. Misalnya, dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sekolah seperti guru kualitas dan kualifikasi, rasio siswa per guru, gaji guru dan insentif lainnya, sekolah fasilitas dan pemeliharaan, serta jumlah sekolah. Selain itu, mereka juga harus memberdayakan perempuan dan penduduk pedesaan dengan mengurangi angka melek huruf, menerapkan program pendidikan sembilan tahun, dan mengembangkan program pendidikan satu atap yang menggabungkan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sekolah menjadi satu gedung yang dekat dengan komunitas. Kedua, pemerintah pusat harus meningkatkan anggaran nasional di bidang pendidikan untuk meningkatkan kesetaraan pendidikan dan untuk memberikan dukungan keuangan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten.

Selanjutnya, pemerintah pusat harus mengubah skema beasiswa untuk menjangkau anak-anak yang tidak mampu melanjutkan ke sekolah setelah menyelesaikan sekolah dasar. Kebijakan lainnya adalah pemerintah pusat harus meningkatkan biaya peluang untuk tidak bersekolah dengan memberikan subsidi tunai langsung kepada keluarga. Selain itu, pemerintah pusat harus mempromosikan pentingnya pendidikan. Terakhir, masyarakat harus berperan aktif sebagai pemimpin dalam pelaksanaannya pendidikan:

METODE

Kajian ini tergolong dalam jenis kajian kebijakan (*policy issues paper*). Prosedur analisis kebijakan disesuaikan dengan tahapan kebijakan serta komponen informasi yang dibutuhkan pada tahapan kebijakan tertentu. Berhubung kajian ini dilakukan pada saat kebijakan sedang dilaksanakan (*policy action*), maka menurut Dunn (1994: 72) prosedur analisis yang sesuai adalah pemantauan (*monitoring*). Selanjutnya, metode dan tehnik yang sesuai untuk pemantauan, antara lain sajian grafis (*graphic displays*) yang mencakup kurva Lorenz dan indek Gini (Dunn, 1994: 359-368).

Data yang dianalisis dalam kajian ini bersumber dari survei social ekonomi nasional (Susenas / BPS) tahun 2015 dan 2020, khususnya tabel: persentase penduduk usia 15 tahun ke atas menurut tipe daerah dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan..

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi sesuai tingkatan sekolah dengan mendapatkan tanda tamat sekolah (ijazah)

Data akan dianalisis melalui sajian grafis, dan selanjutnya ditampilkan dan kurva Lorenz untuk menyajikan ketimpangan pendidikan secara virtual dan terakhir dihitung menggunakan rumus untuk menyajikan ketimpangan secara numerik.

Langkah pertama, menghitung kurva Lorenz dan koefisien gini pendidikan, adalah menghitung tahun sekolah pada enam jenjang pendidikan melalui rumus: :

- Tidak/Blm Pernah Sekolah/ Blm Tamat SD/MI : $y_1 = 0$
- SD/MI : $y_2 = y_1 + C_p = C_p$
- SMP/MTs : $y_3 = y_2 + C_r = C_p + C_r$
- SMA/SMK/MA : $y_4 = y_3 + C_s = C_p + C_r + C_s$
- Perguruan tinggi : $y_5 = y_4 + C_t = C_p + C_r + C_s + C_t$

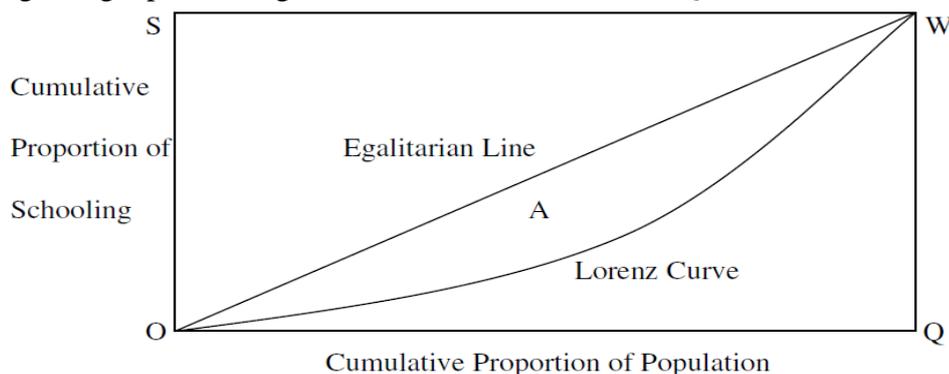
Dimana :

- C_p adalah siklus tidak tamat sekolah dasar (0 tahun)
- C_r adalah siklus sekolah dasar (6 tahun).
- C_s adalah siklus sekolah menengah pertama (3 tahun).
- C_t adalah siklus SMA (3 tahun).
- C_o adalah siklus pendidikan tinggi (4 tahun)

Metode tidak langsung untuk membangun kurva Lorenz pendidikan, hasilnya ditunjukkan pada gambar 3, yaitu kombinasi antara persentase kumulatif tahun sekolah pada sumbu vertikal, dan persentase kumulatif populasi pada sumbu horizontal. Garis empat puluh lima derajat adalah garis pendidikan egaliter, mewakili persamaan pemerataan sempurna sekolah.

Langkah kedua, membangun kurva Lorenz. kurva Lorenz juga disebut sebagai metode penghitungan ketimpangan secara tidak langsung. Kurva Lorenz pendidikan, disajikan pada gambar 2, yaitu kombinasi antara persentase kumulatif tahun sekolah pada sumbu vertikal, ditunjukkan di S, dan persentase kumulatif populasi pada sumbu horizontal, ditunjukkan di Q.

Garis empat puluh lima derajat adalah garis pendidikan egaliter, mewakili persamaan sempurna sekolah. Dengan demikian, Gini pendidikan diperkirakan menggunakan metode tidak langsung sebagai perbandingan antara luas A dan luas OWQ.



Gambar 1. Kurva Lorenz Pendidikan

Sumber: Digdowiseiso, 2010

Langkah ketiga, menghitung indeks gini pendidikan, berdasarkan kurva Lorenz, melalui rumus Dunn (1994: 366) :

$$GI = \frac{[(\sum X_i Y_{i+1}) - (\sum X_{i+1} Y_i)]}{\sum X_i Y_{i+1}}$$

X_i = distribusi persentase kumulatif dari lama sekolah

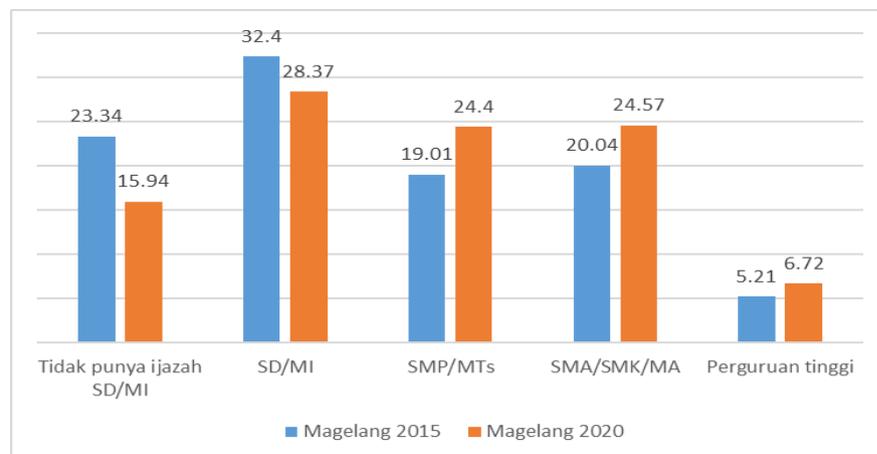
Y_i = distribusi persentase kumulatif dari penduduk menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pendidikan tinggi yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai, maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikan tinggi, cenderung mempunyai pengetahuan yang luas serta keterampilan atau keahlian yang tinggi. Tingginya tingkat pendidikan juga dapat mencerminkan taraf intelektualitas suatu masyarakat.

Namun kondisi ideal tersebut belum tercapai di Kab. Magelang, sebagaimana disajikan dalam gambar 2, komposisi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan. Terlihat bahwa masih besar proporsi penduduk yang tidak memiliki ijazah, dan sangat kecil proporsi penduduk yang memiliki ijazah sarjana. Pada tahun 2015, proporsi penduduk yang memiliki ijazah SD kebawah mencapai 55,74 persen, menurun pada tahun 2020 menjadi 44,31 persen.

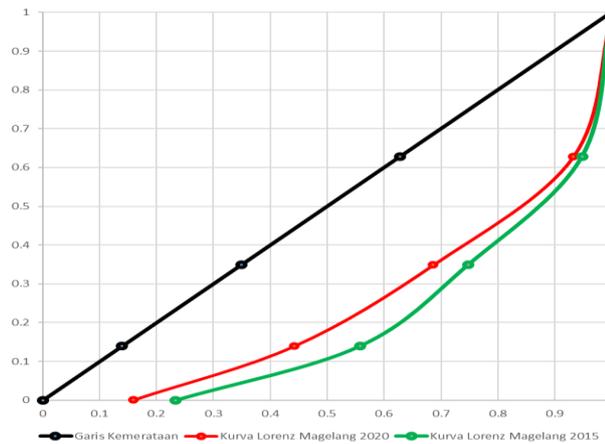
Secara umum, antara tahun 2015 dan 2020, ada perbaikan dalam 'angka pendidikan yang ditamatkan', dimana pada jenjang SD kebawah terjadi penurunan dan pada jenjang SMP keatas mengalami kenaikan. Penurunan besar terjadi pada kategori 'tidak / belum pernah sekolah'. Dan kenaikan yang besar pada kategori 'tamat perguruan tinggi'.



Gambar 2. *Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke atas dan Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan di Kab. Magelang tahun 2015 dan 2020*
Sumber : Susenas, 2015 dan 2020

Berdasarkan data pada gambar 2, dilakukan penghitungan lama sekolah, pada enam jenjang pendidikan tersebut, maka dihasilkan kurva Lorenz sebagai berikut. Kurva Lorenz

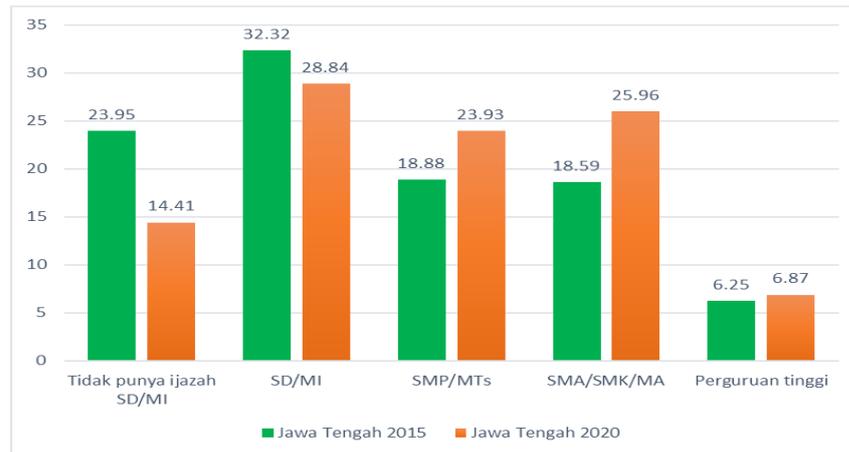
pendidikan disebut juga sebagai metode tidak langsung untuk menghitung keimpangan pendidikan, sebagaimana disajikan pada gambar 3. Kurva menyajikan kombinasi antara persentase kumulatif tahun sekolah pada sumbu vertikal, dan persentase kumulatif populasi pada sumbu horizontal. Garis empat puluh lima derajat adalah garis pendidikan egaliter, mewakili persamaan pemerataan sempurna sekolah.



Gambar 3. *Kurva Lorenz Pendidikan Kab. Magelang Tahun 2015 dan 2020*
Sumber : Susenas, 2015 dan 2020

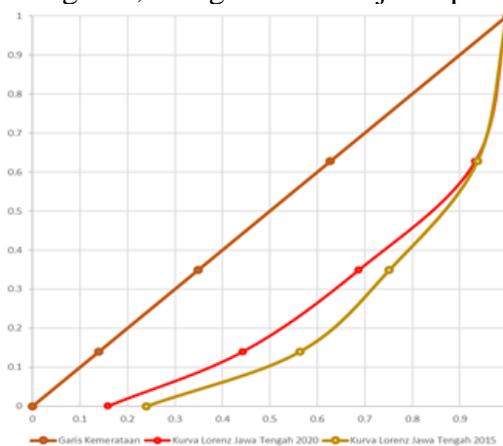
Dalam gambar ditunjukkan bahwa ada jarak yang jauh antara kurva Lorents dengan kurva pemerataan sempurna. Artinya, terjadi ketimpangan pendidikan yang cukup besar. Namun, ada kecenderungan untuk menyempit, sebagaimana ditunjukkan oleh pergeseran (shift) kurva warna hijau ke warna merah muda. Pergeseran ini menegaskan hipotesis bahwa semakin tinggi angka rata-rata sekolah akan menurunkan ketimpangan pendidikan. Hasil perhitungan indeks gini pendidikan Kab. Magelang tahun 2015 sebesar 0.543 menurun pada tahun 2020 menjadi 0.469.

Di Jawa Tengah, komposisi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan disajikan dalam gambar 4. Terlihat bahwa masih besar proporsi penduduk yang tidak memiliki ijazah, dan sangat kecil proporsi penduduk yang memiliki ijazah sarjana. Pada tahun 2015, proporsi penduduk yang memiliki ijazah SD kebawah mencapai 56,27 persen, menurun pada tahun 2020 menjadi 44,25 persen. Secara umum, antara tahun 2015 dan 2020, ada perbaikan dalam 'angka pendidikan yang ditamatkan', dimana pada jenjang SD kebawah terjadi penurunan dan pada jenjang SMP keatas mengalami kenaikan. Penurunan besar terjadi pada kategori 'tidak / belum pernah sekolah'. Dan kenaikan yang kecil pada kategori 'tamam perguruan tinggi'.



Gambar 4. *Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke atas dan Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 dan 2020*
Sumber : Susenas, 2015 dan 2020

Berdasarkan data pada gambar 4, dilakukan penghitungan lama sekolah, pada enam jenjang pendidikan tersebut, maka dihasilkan kurva Lorenz sebagai berikut. Kurva Lorenz pendidikan disebut juga sebagai metode tidak langsung untuk menghitung keimpangan pendidikan dan menyajikan secara grafis, sebagaimana disajikan pada gambar 5.



Gambar 5. *Kurva Lorenz Pendidikan Prov. Jawa Tengah Tahun 2015 dan 2020*
Sumber : Susenas, 2015 dan 2020.

Dalam gambar ditunjukkan bahwa ada jarak yang jauh antara kurva Lorents dengan kurva pemerataan sempurna. Artinya, terjadi ketimpangan pendidikan yang cukup besar. Namun, ada kecenderungan untuk menyempit, sebagaimana ditunjukkan oleh pergeseran (shift) kurva warna coklat muda ke warna merah muda. Pergeseran ini menegaskan hipotesis bahwa semakin tinggi angka rata-rata sekolah akan menurunkan ketimpangan pendidikan.

Hasil perhitungan indek gini pendidikan Prov. Jawa Tengah tahun 2015 sebesar 0.547 menurun pada tahun 2020 menjadi 0.456. Secara nasional, komposisi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan disajikan dalam gambar 6. Terlihat bahwa masih besar proporsi penduduk yang tidak memiliki ijazah, dan sangat kecil proporsi penduduk yang memiliki ijazah sarjana. Pada tahun 2015, proporsi penduduk yang memiliki ijazah SD kebawah mencapai 46.31 persen, menurun pada tahun 2020 menjadi 41.75 persen. Data menunjukkan bahwa penduduk yang berijazah SD ke bawah di tingkat nasional lebih rendah dari Prov. Jateng maupun Kab. Magelang. Secara umum, antara tahun

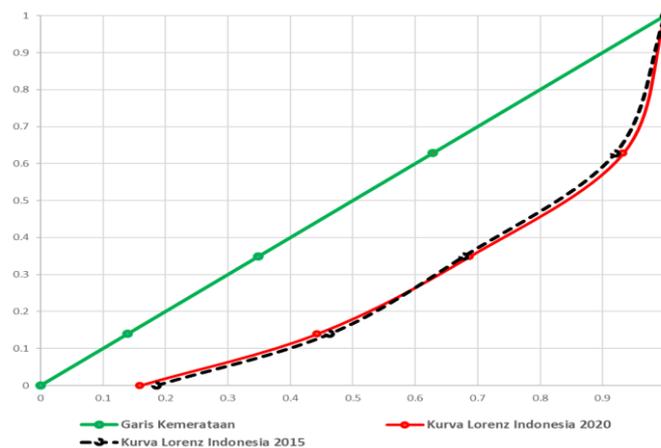
2015 dan 2020, ada perbaikan dalam ‘angka pendidikan yang ditamatkan’, dimana pada jenjang SD kebawah terjadi penurunan dan pada jenjang SMP keatas mengalami kenaikan. Penurunan besar terjadi pada kategori ‘tidak / belum pernah sekolah’. Dan kenaikan yang cukup besar pada kategori ‘tamat perguruan tinggi’.



Gambar 6. *Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke atas dan Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan nasional tahun 2015 dan 2020*

Sumber : Susenas, 2015 dan 2020

Berdasarkan data pada gambar 6, dilakukan penghitungan lama sekolah, pada enam jenjang pendidikan tersebut, maka dihasilkan kurva Lorenz sebagai berikut. Kurva Lorenz pendidikan disebut juga sebagai metode tidak langsung untuk menghitung keimpangan pendidikan dan menyajikan secara grafis, sebagaimana disajikan pada gambar 7.



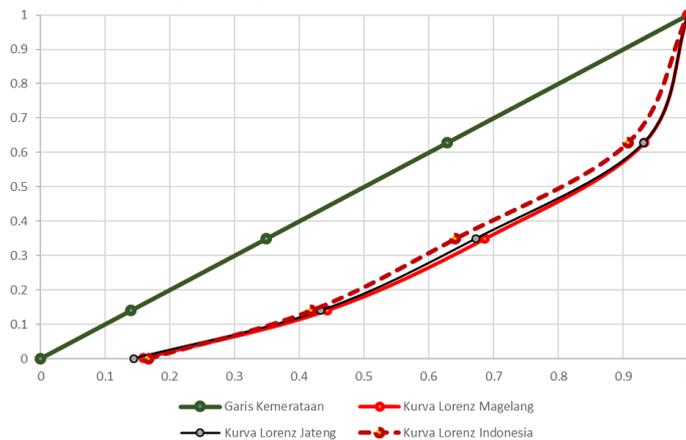
Gambar 7. *Kurva Lorenz Pendidikan Indonesia Tahun 2015 dan 2020*

Sumber : Susenas, 2015 dan 2020

Dalam gambar ditunjukkan bahwa ada jarak yang jauh antara kurva Lorents dengan kurva pemerataan sempurna. Artinya, terjadi ketimpangan pendidikan yang cukup besar. Dan, hanya ada sedikit kecenderungan untuk menyempit, sebagaimana ditunjukkan oleh pergeseran (shift) kurva warna hitam ke warna merah muda. Pergeseran ini menegaskan hipotesis bahwa semakin tinggi angka rata-rata sekolah akan menurunkan ketimpangan pendidikan.

Hasil perhitungan indek gini pendidikan secara nasional tahun 2015 sebesar 0.4693 menurun pada tahun 2020 menjadi 0.430. Dalam gambar 8 ditunjukkan perbandingan

kurva Lorents Pendidikan Indonesia, Jawa Tengah dan Magelang. Nampak bahwa kurva nasional lebih dekat ke garis egaliter.



Gambar 8. Perbandingan Kurva Lorenz Pendidikan Indonesia, Jawa Tengah dan Magelang Tahun 2015 dan 2020

Sumber : Susenas, 2015 dan 2020.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Hasil perhitungan indek gini pendidikan Kab. Magelang tahun 2015 sebesar 0.547 menurun pada tahun 2020 menjadi 0.469. Prov. Jawa Tengah tahun 2015 sebesar 0,546 menurun pada tahun 2020 menjadi 0.456. Nasional tahun 2015 sebesar 0.4693 menurun pada tahun 2020 menjadi 0.430. Dari nilai indek gini tersebut ketiga wilayah pengamatan dapat digolongkan berada dalam ketimpangan 'sedang'. Hasil perhitungan indeks gini menunjukkan bahwa Indonesia lebih merata daripada Jawa Tengan, dan Magelang paling tidak merata.
2. Hubungan negatif ditemukan antara rata-rata tahun sekolah dan indeks Gini pendidikan. hubungan positif ditemukan antara tingkat kenaikan rata-rata tahun sekolah dan penurunan indek Gini pendidikan.

Saran

Dengan demikian, **rekomendasi kebijakan** yang diajukan adalah peningkatan rata-rata lama sekolah, sebagai berikut:

1. Menempatkan pendidikan sebagai prioritas pembangunan nasional dan daerah, dengan menempatkan perluasan akses layanan pendidikan, sebagai super prioritas pembangunan daerah.
2. Menempatkan pengurangan ketimpangan pendidikan sebagai indicator sasaran pembangunan nasional dan daerah. Dimana indicator ini dibangun dengan basis data 'persentase penduduk umur 15 tahun ke atas dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan' yang merupakan indicator benefit pendidikan.
3. Menerapkan dua strategi pengurangan ketimpangan pendidikan yaitu, pertama: menurunkan beban biaya pendidikan yang harus ditanggung masyarakat. Kedua, meningkatkan pendapatan. Dua strategi ini adalah untuk mengatasi, adanya dua jenis beban biaya pendidikan, yaitu biaya langsung (sumbangan pendidikan, transportasi, buku dan perlengkapan sekolah, serta biaya hidup selama sekolah). Dan biaya tidak langsung (opportunity cost) berupa hilangnya peluang untuk memperoleh pendapata karena tidak bekerja demi sekolah.

4. Melaksanakan program-program untuk pengurangan beban, pengembangan sekolah satu atap, perluasan kelompok belajar, bea siswa miskin, BLT bagi peserta Kejar (Paket A, B, C), pembangunan infrastruktur: jalan, jembatan dan transportasi;
5. Melaksanakan program-program untuk peningkatan pendapatan, meliputi program-program untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif, antara lain pelatihan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja utamanya pada sector-sektor yang membutuhkan input iptek, antara lain teknologi informatika dan telekomunikasi, pengembangan berbasis TIK, antara lain e-commerce dan penerapan teknologi finansial, UKM, pengembangan ekonomi kreatif untuk memberi wadah para pemuda-pemuda millennial, pembangunan pedesaan (padat karya), penanggulangan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Borjas, George J (1996), *Labor Economic*, New York: The McGraw-Hill Companies. Inc.
- Digdowiseiso, Kumba (2010), *Measuring Gini Coefficient Of Education: The Indonesian Cases*, Munich Personal RePEc Archive, <https://mpira.ub.uni-muenchen.de/19865/>, pada tanggal 3 Februari 2021
- Dunn, William N, (1994), *Public Policy Analysis*, New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Evi Syuriani Harahap, Indra Maipita, M. Fitri Rahmadana (2020), Determinant Analysis of Education Inequalities in Indonesia, BIRCI-Journal Volume 3, No 2, May 2020, www.bircu-journal.com/index.php/birci, pada tanggal 1 Februari 2021
- Gillis, Malcolm; Perkins, Dwigth H.; Rommer, Michael; Snodgrass, Donald R (1992), *Economic of Development*, London: WW Norton & Company
- Samarrai, Samer Al (2013), *In Indonesia, Tackling Education Inequality Through Better Governance*, <https://blogs.worldbank.org/>, pada tanggal 31 Maret 2021
- Vinod Thomas, Yan Wang, and Xibo Fan (2010), Measuring Education Inequality: Gini Coefficients of Education, <http://www.worldbank.org/devforum/>, pada tanggal 6 Februari 2021.